

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perdesaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional, dewasa ini mendapat sorotan yang amat tajam dari berbagai kalangan. Persoalan ini selain menyangkut sebagian besar ( $\pm 75\%$ ) masyarakat Indonesia berdiam di desa (BPS, 2001), juga karena banyak masyarakat persoalan pembangunan yang belum mampu dipecahkan di tingkat desa, seperti masalah pengangguran, ketimpangan, kemiskinan kurang lebih 60% bertempat tinggal di desa.

Masalah dalam pembangunan perdesaan menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat (desa) yang senantiasa beriringan dengan masalah perangkat lain seperti kemiskinan. Chamber (1988) menyatakan bahwa ada keterkaitan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkat kemiskinan (*poverty*), kerentanan (*vulnerability*), keterangsinan (*isolation*) menjadi sumber ketidakberdayaan dalam pembangunan perdesaan. Cabb (2005) juga menyatakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan beberapa faktor seperti: 1. Ketiadaan akses terhadap informasi, 2) ketiadaan dukungan financial, 3) pelatihan, 4) jaminan politik dan 5) adanya ketegangan sosial. Untuk itu, perlu upaya pembangunan perdesaan yang dijiwai semangat otonomi yang ditujukan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi, kemandirian dan kemampuan sangat relevan bagi pembangunan yang berorientasi pada

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (Supritna, 200). Konsep ini sejalan dengan arah kebijakan Nasional Pembangunan Perdesaan pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2004-2009 Bab 5: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. Pada bagian lain dinyatakan: Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan peningkatan akses masyarakat pada informasi serta sumber-sumber daya pembangunan.

Peraturan pemerintah ini mengisyaratkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat untuk mampu dan berkembang secara mandiri sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat perdesaan. Upaya ke arah itu, melalui pengembangan kelembagaan yang mampu berfungsi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Berbagai program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa belum secara signifikan mengangkat harkat hidup masyarakat desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi, menyediakan lapangan kerja. Situasi yang terjadi adalah ketergantungan, konservatisme dan pragmatisme masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah (Eko, 2004). Kegagalan program pemerintah

disebabkan banyak hal, mulai dari strategi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang salah urus.

Lemahnya keberdayaan masyarakat desa dalam melakukan perubahan terkait dengan kurangnya masyarakat desa memperoleh akses informasi terhadap sumber-sumber daya pembangunan sebagai konsekuensi adanya dinamika dan perubahan kebijakan yang seharusnya mereka ketahui dan mereka lakukan. Tidak heran, apabila timbul ketimpangan aktivitas dan dinamika lembaga desa. Adanya salah persepsi berakibat pada munculnya konflik sosial yang mengarah dalam mengadopsi nilai baru dalam pembangunan.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan lembaga yakni Kepala Desa harus tanggap terhadap pesan-pesan pembangunan dan mampu menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dalam bahasa atau lembaga yang kiranya dapat dipahami masyarakatnya. Belum efektifnya komunikasi yang dibangun berimplikasi pada tidak sedikit pesan-pesan pembangunan yang tidak sampai pada khalayak (masyarakat).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di wilayah Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena posisi geografis Kecamatan Siborongborong cukup strategis sebagai pintu masuk dari Kota Medan dan penghubung ke Tarutung dan Lintong Nihuta, dan karena kecamatan siborongborong merupakan kecamatan yang peningkatan pembangunan daerahnya relatif lambat yang disebabkan masih lemahnya pembangunan perdesaan di kecamatan tersebut. Bertolak dari latar belakang

masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul *”Pemberdayaan Masyarakat Pada Pembangunan Perdesaan Di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.*

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan *problem statement* yaitu bahwa”. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan, tegasnya bahwa pengembangan lembaga desa belum optimal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan perdesaan”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada Identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada keadaan atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong pada dimensi sosial, politis, ekonomi dan psikologis

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada dimensi sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada dimensi Politis?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada dimensi Ekonomis?
4. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada dimensi psikologis?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pada dimensi sosial
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pada dimensi politis

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pada dimensi ekonomis
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pada dimensi psikologis

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Dari aspek teoritis, dapat memberi sumbangan terhadap pengembangan teori penyebaran informasi khususnya teori-teori pendekatan keruangan.
2. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi dan rumusan-rumusan pemikiran yang aktual, pragmatis bagi para pengambil keputusan (praktisi)
3. Kemudian bagi para peneliti, dapat dijadikan sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam kajian serupa dari variabel lain yang tidak teridentifikasi sehingga serta dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Geografi